WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Inddonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Qanun Kota Lhokseumawe 1 Tahun 2015 tentang Gampong tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota lhokseumawe Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokeumawe.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.

9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
14. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
15. Tuha Lapan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
24. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BHPD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
25. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHRD adalah bagian dari penerimaan hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
26. Jumlah BHPD yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut BHPDx adalah bagian bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh Gampong x.
27. Jumlah BHRD yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut BHRDx adalah bagian bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh Gampong x.
28. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum yang selanjutnya disebut BHPDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
29. Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimum yang selanjutnya disebut BHRDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
30. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disebut BHPDMx adalah bagi hasil pajak daerah minimum Gampong x.

31. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disebut BHRDMx adalah bagi hasil retribusi daerah minimum Gampong x.

32. Bagi Hasil Pajak Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagi hasil pajak daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHPDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.

33. Bagi Hasil Retribusi Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagi hasil retribusi daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHRDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.

34. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disebut BHPDPx adalah bagi hasil pajak maksimum Gampong x.

35. Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disebut BHRDPx adalah bagi hasil retribusi daerah maksimum Gampong x.

36. Nilai Bobot Gampong adalah nilai Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah nilai bobot Gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

37. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disingkat BGx adalah nilai bobot yang diterima oleh Gampong x.

38. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan nilai bobot Gampong antara lain: Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.

39. Koefisien Variabel adalah koefisien angka yang dimiliki oleh Gampong untuk setiap variable.

40. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

42. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.

44. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan pajak terhutang kepada wajib pajak.
46. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA BHPD DAN BHRD
Pasal 2

Dana BHPD dan BHRD yang bersumber dari APBK untuk mendanai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang diatur dan diurus oleh Gampong.

Pasal 3

Dana BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk membiayai belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan bidang pembangunan Gampong.

Pasal 4

Penggunaan dana BHPD dan BHRD tertuang dalam prioritas belanja Gampong yang disepakati dalam musyawarah Gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BHPD DAN BHRD
Pasal 5

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan peningkatan target penerimaan hasil pajak dan retribusi melalui:
a. pemberian upah pungut PBB-P2;
b. operasional pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi;
c. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 6

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang pembangunan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Gampong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasrana Gampong; dan
c. pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
d. pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan;
e. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Gampong; dan
f. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a. pendirian dan pengembangan BUMG;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong; dan
c. pengembangan Gampong wisata.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 10

(1) Pemerintah Kota memberikan BHPD dan BHRD kepada Pemerintahan Gampong dalam bentuk uang.

(2) BHPD dan BHRD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berjalan.

(3) Pengalokasian BHPD dan BHRD merupakan jumlah bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Gampong untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

Pemberian bagian dari penerimaan BHPD dan BHRD diberikan kepada Pemerintah Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Azas Merata adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD yang sama untuk setiap Gampong, yang selanjutnya disebut BHPDM dan BHRDM; dan
b. Azas Adil adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD berdasarkan Nilai Bobot (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi penerimaan PBB-P2).

Bagian Kedua
Penentuan Besaran BHPD dan BHRD
Untuk Setiap Gampong
Pasal 12

Penentuan jumlah bagian BHPD dan BHRD yang diberikan untuk setiap Gampong berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. BHPDx dan BHRDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah BHPDM dan BHRDM Gampong ditambah jumlah BHPDP dan BHRDP Gampong dalam wilayah Kota.
b. BHPDMx dan BHRDMx adalah 60 % (enam puluh persen) dari BHPD dan BHRD dibagi dengan jumlah Gampong.
c. BHPDPx dan BHRDPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % (empat puluh persen) dari BHPD dan BHRD dikalikan bobot Gampong.
d. BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

Bagian Ketiga
Besaran BHPD dan BHRD Untuk Setiap Gampong
Pasal 13

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan besaran BHPD dan BHRD untuk masing-masing Gampong dengan besarannya sebagimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tahap Penyaluran
Pasal 14

(1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Gampong.

(2) Penyaluran BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling cepat pada bulan Juli pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   1. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
   2. laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya;
   3. Surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kelapa BPKD perihal Permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD Tahap I;
   4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan BHPD dan BHRD Tahap I dari Keuchik;
   5. Bukti transfer tahun anggaran sebelumnya;
   6. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap I;
   7. rekening koran Gampong;

b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling lambat pada bulan Oktober pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   1. Surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BKPD perihal Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD Tahap II;
   2. laporan realisasi penyerapan BHPD dan BHRD Tahap I setelah penggunaan BHPD dan BHRD telah mencapai 80 % (delapan puluh persen) dari Penerima BHPD dan BHRD Tahap I;
   3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan BHPD dan BHRD Tahap II dari Keuchik;
   4. laporan penggunaan BHPD dan BHRD Tahap I;
   5. bukti transfer tahap sebelumnya;
   6. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap II;
   7. rekening koran Gampong;

Bagian Kelima
Tahap Pencairan
Pasal 15

(1) Pencairan BHPD dan BHRD dari RKG oleh Bendahara Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD.

(2) Pencairan BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
   b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan;
   c. Lampiran bukti transaksi

(5) Pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelasanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 16

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD kepada Walikota melalui Camat setiap semester.

(2) Laporan penggunaan BHPD dan BHRD merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBG.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SiLPA BHPD dan BHRD
Pasal 17

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD.

Pasal 18

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD ditemukan SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20 % (dua puluh persen), Walikota:
   a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA BHPD dan BHRD tersebut; dan/atau
   b. meminta aparat pengawas intern daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari BHPD dan BHRD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA BHPD dan BHRD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 19

(1) Walikota menunda penyaluran Dana BHPD dan BHRD, dalam hal:
   a. Keuchik tidak menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG, laporan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya;
   b. terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penyaluran Dana BHPD dan BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota.

(3) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal SiLPA BHPD dan BHRD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana BHPD dan BHRD yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tidak dilakukan.

(5) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap II.

(6) Dalam penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD
Pasal 20

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana BHPD dan BHRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) masih terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pemotongan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPD dan BHRD Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penghargaan
Pasal 21

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Gampong yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan BHPD dan BHRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan BHPD dan BHRD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan BHPD dan BHRD.

Pasal 23

(1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan BHPD dan BHRD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan serta Tim Pengelola Gampong.

(2) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan BHPD dan BHRD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Gampong, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

Pasal 24

(1) Tim Pembinaan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari:
   a. Penanggung Jawab;
   b. Pembina;
   c. Koordinator;
   d. Ketua;
   e. Wakil Ketua;
   f. Sekretaris; dan
   g. Anggota sesuai kebutuhan.

(2) Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, percepatan, penyaluran dan pelaporan keuangan Gampong;
   b. asistensi dan evaluasi dokumen perencanaan RPJMG dan RKPG;
   c. asistensi dan evaluasi RAPBG dan APBG-Perubahan;
   d. mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB;
   e. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
   f. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan pengelola BHPD dan BHRD;
   g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

(3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
   a. Satuan Kerja Pembinaan Adminstrasi Keuangan Gampong;
   b. Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat
   c. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan;
   d. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan;

(4) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

(1) Tim Pembinaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari:
   a. Camat selaku Ketua;
   b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD) selaku PJOK.

(2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
   a. melaksanakan sosialisasi;
   b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
   c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB;

d. memfasilitasi permohonan penyaluran BHPD dan BHRD;
e. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
f. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
g. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan;
h. melaporkan pengelolaan BHPD dan BHRD kepada Walikota C.q Kepala DPMG;
i. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di Gampong;
j. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
k. menghimpun dan menyimpan arsip surat pertanggungjawaban dari Gampong di wilayah kerjanya.

Pasal 26

(1) Tim Pengelola Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari:
a. Penanggung jawab dijabat oleh Keuchik selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong;
b. Sekretaris Gampong;
c. Kepala Seksi;
d. Bendahara Gampong.

(2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Gampong adalah sebagai berikut :
a. Penanggung jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
b. Sekretaris Gampong bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan dana desa yang bertugas:
1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan BHPD dan BHRD;
2. menyusun RAB BHPD dan BHRD, perubahan RAB dan pertanggung jawaban pelaksanaan BHPD dan BHRD;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BHPD dan BHRD; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran BHPD dan BHRD.

c. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:
   1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
   2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBG;
   3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
   4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
   6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Gampong di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan BHPD dan BHRD.

(3) Tim Pelaksana Kegiatan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
   a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Gampong pada tempat-tempat strategis;
   b. menyusun RAB berdasarakan data harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kota;
   c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
   d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
   e. menetapkan penyediaan barang/jasa;
   f. membuat rancangan surat perjanjian;
   g. menandatangani surat perjanjian;
   h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
   i. mengelola kegiatan ditingkat Gampong; dan
   j. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Keuchik dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Sekretaris, kepala seksi, bendahara, dan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Keuchik.

Pasal 27

(1) Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota wajib melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana BHPD dan BHRD;

(2) Setiap pengaduan tentang Pengelolaan dana BHPD dan BHRD di Gampong wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Februari 2018 M
19 Jumadil Awal 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Februari 2018 M
19 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI
HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2018

A. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

1. TOTAL BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH = Rp 381.676.459

2. PEMBAGIAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

a. Jumlah Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Minimal (BHRDM) =	60% x	Rp	381.676.459	=	Rp	229.005.875
b. Jumlah Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional (BHRDP) =	40% x	Rp	381.676.459	=	Rp	152.670.584
			TOTAL BHRD	=	Rp	381.676.459

3. PEMBAGIAN BHRD MINIMAL (BHRDM)
BHRD Minimal (BHRDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

Jumlah BHRDM per Gampong = $\frac{\text{Rp } 229.005.875}{68 \text{ Gampong}}$ = Rp 3.367.733

4. PEMBAGIAN BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)
BHRD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 3 Variabel :

a. Variabel Jumlah Lembar SPPT PBB	0,15
b. Variabel Ketetapan PBB	0,15
c. Variabel Realisasi Penerimaan PBB	0,70
Total Bobot Variabel	1,00

B. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2018

1. TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH = Rp 2.451.944.767

2. PEMBAGIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

a. Jumlah Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (BHPDM) =	60% x	Rp	2.451.944.767	=	Rp	1.471.166.860
b. Jumlah Bagian Hasil Pajak Daerah Proporsional (BHPDP) =	40% x	Rp	2.451.944.767	=	Rp	980.777.907
			TOTAL BHPD	=	Rp	2.451.944.767

3. PEMBAGIAN BHPD MINIMAL (BHPDM)
BHPD Minimal (BHPDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

Jumlah BHPDM per Gampong = $\frac{\text{Rp } 1.471.166.860}{\text{68 Gampong}}$ = Rp 21.634.807

4. PEMBAGIAN BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)
BHPD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 3 Variabel :

a. Variabel Jumlah Lembar SPPT PBB	0,15
b. Variabel Ketetapan PBB	0,15
c. Variabel Realisasi Penerimaan PBB	0,70
Total Bobot Variabel	1,00

C. RINCIAN PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,15	ar	0,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MUARA DUA							
1	Alue Awe	0,011	1.072	0,003	58.108.044	0,002	13.976.008	0,005
2	Blang Crum	0,006	807	0,003	34.387.293	0,001	5.408.248	0,002
3	Cut Mamplam	0,006	922	0,003	27.975.518	0,001	4.198.009	0,002
4	Meunasah Mee	0,009	703	0,002	76.875.286	0,003	9.630.821	0,004
5	Cot Girek Kandang	0,009	922	0,003	31.269.826	0,001	13.106.031	0,005
6	Keude Cunda	0,015	605	0,002	69.317.551	0,002	28.331.148	0,011
7	Uteunkot	0,049	1.709	0,005	271.451.715	0,010	89.873.470	0,034
8	Lhok Mon Puteh	0,001	312	0,001	1.285.231	0,000	1.149.338	0,000
9	Meunasah Mesjid	0,026	1.545	0,005	158.652.977	0,006	40.752.136	0,016
10	Meunasah Panggoi	0,031	1.760	0,006	187.192.431	0,007	48.845.020	0,019
11	Paya Bili	0,001	154	0,000	561.089	0,000	356.237	0,000
12	Meunasah Alue	0,005	605	0,002	26.324.407	0,001	4.552.935	0,002
13	Paya Punteuet	0,007	779	0,002	46.955.768	0,002	8.228.871	0,003
14	Blang Poroh	0,001	318	0,001	4.637.059	0,000	831.326	0,000
15	Meunasah Manyang	0,003	467	0,001	14.890.120	0,001	2.506.247	0,001
16	Meunasah Blang	0,004	929	0,003	6.366.541	0,000	913.519	0,000
17	Paloh Batee	0,001	263	0,001	1.269.997	0,000	207.097	0,000
	JUMLAH	0,185	13.872	0,044	1.017.520.853	0,036	272.866.461	0,105

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,00	ak	0,00	ar	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	BANDA SAKTI							
1	Kuta Blang	0,075	933	0,003	255.097.631	0,009	164.485.539	0,063
2	Tumpok Teungoh	0,029	2.016	0,006	179.199.300	0,006	43.530.513	0,017
3	Simpang Empat	0,063	849	0,003	215.879.200	0,008	136.893.000	0,052
4	Kampung Jawa Lhokseum	0,047	729	0,002	141.686.996	0,005	102.748.781	0,039
5	Kota Lhokseumawe	0,063	920	0,003	189.101.277	0,007	138.375.478	0,053
6	Mon Geudong	0,028	1.140	0,004	139.183.741	0,005	51.314.820	0,020
7	Keude Aceh	0,015	435	0,001	68.148.776	0,002	29.238.222	0,011
8	Pusong Lama	0,004	566	0,002	18.922.056	0,001	3.302.207	0,001
9	Hagu Teungoh	0,041	866	0,003	143.476.320	0,005	86.510.892	0,033
10	Uteun Bayi	0,017	1.055	0,003	102.455.169	0,004	25.558.660	0,010
11	Ujong Blang	0,008	924	0,003	66.895.142	0,002	7.998.434	0,003
12	Hagu Selatan	0,017	733	0,002	77.262.768	0,003	32.050.424	0,012
13	Pusong Baru	0,007	523	0,002	40.203.167	0,001	11.331.819	0,004
14	Ulee Jalan	0,003	507	0,002	25.129.963	0,001	1.864.417	0,001
15	Banda Masen	0,009	1.018	0,003	54.529.096	0,002	9.024.299	0,003
16	Lancang Garam	0,027	415	0,001	98.154.606	0,003	58.569.802	0,022
17	Kampung Jawa Baru	0,022	757	0,002	91.797.081	0,003	42.145.958	0,016
18	Hagu Barat Laut	0,009	856	0,003	74.719.164	0,003	9.651.394	0,004
	JUMLAH	0,485	15.242	0,049	1.981.841.453	0,070	954.594.659	0,366

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,00	ak	0,00	ar	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	BLANG MANGAT							
1	Kuala	0,002	370	0,001	13.429.550	0,000	1.304.075	0,000
2	Blang Cut	0,003	593	0,002	10.814.076	0,000	733.390	0,000
3	Jambo Mesjid	0,002	280	0,001	8.583.578	0,000	1.280.458	0,000
4	Jambo Timu	0,002	414	0,001	13.393.216	0,000	615.645	0,000
5	Tunong	0,002	406	0,001	14.525.523	0,001	859.014	0,000
6	Blang Teue	0,001	221	0,001	1.397.404	0,000	208.674	0,000
7	Teungoh	0,001	264	0,001	9.660.362	0,000	776.103	0,000
8	Baloy	0,002	591	0,002	4.068.030	0,000	721.587	0,000
9	Mane Kareung	0,003	766	0,002	7.608.661	0,000	351.720	0,000
10	Asan Kareung	0,002	431	0,001	3.579.553	0,000	656.641	0,000
11	Rayeuk Kareung	0,002	550	0,002	5.517.015	0,000	1.128.961	0,000
12	Blang Punteuet	0,003	534	0,002	10.214.770	0,000	3.061.084	0,001
13	Kumbang Punteuet	0,002	331	0,001	10.887.150	0,000	1.163.149	0,000
14	Mesjid Punteuet	0,011	879	0,003	84.156.345	0,003	14.627.782	0,006
15	Ulee Blang Mane	0,009	312	0,001	33.308.462	0,001	17.425.998	0,007
16	Keude Punteuet	0,002	141	0,000	6.575.752	0,000	2.198.194	0,001
17	Alue Lim	0,008	873	0,003	19.482.434	0,001	12.250.298	0,005
18	Blang Buloh	0,002	546	0,002	8.978.084	0,000	1.142.193	0,000
19	Blang Weu Panjoe	0,004	1.017	0,003	9.453.247	0,000	653.303	0,000
20	Jeulikat	0,006	1.052	0,003	22.108.832	0,001	4.360.926	0,002
21	Blang Weu Baroh	0,002	476	0,002	4.284.963	0,000	752.871	0,000
22	Seuneubok	0,000	125	0,000	479.820	0,000	136.135	0,000
	JUMLAH	0,072	11.172	0,036	302.506.827	0,011	66.408.201	0,025

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,00	ak	0,00	ar	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	MUARA SATU							
1	Batuphat Barat	0,005	595	0,002	24.338.788	0,001	4.778.515	0,002
2	Blang Panyang	0,009	689	0,002	41.749.089	0,001	13.407.996	0,005
3	Meunasah Dayah	0,001	243	0,001	690.113	0,000	127.120	0,000
4	Paloh Punti	0,001	365	0,001	1.307.061	0,000	131.027	0,000
5	Blang Pulo	0,009	1.199	0,004	62.927.144	0,002	8.246.907	0,003
6	Batuphat Timur	0,012	812	0,003	59.186.851	0,002	19.518.744	0,007
7	Blang Naleung Mameh	0,202	483	0,002	639.969.580	0,023	465.119.478	0,178
8	Cot Trieng	0,001	295	0,001	1.103.919	0,000	281.082	0,000
9	Padang Sakti	0,007	833	0,003	51.080.603	0,002	7.287.890	0,003
10	Meuria Paloh	0,006	903	0,003	50.019.636	0,002	3.457.362	0,001
11	Ujong Pacu	0,005	286	0,001	11.528.304	0,000	10.010.208	0,004
	JUMLAH	0,259	6.703	0,021	943.901.088	0,033	532.366.329	0,204
	TOTAL	1,000	46.989	0,150	4.245.770.221	0,150	1.826.235.650	0,700

D. RINCIAN BESARAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE 2018

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	I. MUARA DUA				
1	Alue Awe	0,011	3.367.733,46	1.653.731,78	5.021.465,00
2	Blang Crum	0,006	3.367.733,46	895.261,22	4.262.995,00
3	Cut Mamplam	0,006	3.367.733,46	845.902,31	4.213.636,00
4	Meunasah Mee	0,009	3.367.733,46	1.320.845,55	4.688.579,00
5	Cot Girek Kandang	0,009	3.367.733,46	1.384.959,13	4.752.693,00
6	Keude Cunda	0,015	3.367.733,46	2.326.643,41	5.694.377,00
7	Uteunkot	0,049	3.367.733,46	7.556.341,57	10.924.075,00
8	Lhok Mon Puteh	0,001	3.367.733,46	226.246,78	3.593.980,00
9	Meunasah Mesjid	0,026	3.367.733,46	3.993.477,86	7.361.211,00
10	Meunasah Panggoi	0,031	3.367.733,46	4.725.781,98	8.093.515,00
11	Paya Bili	0,001	3.367.733,46	98.926,52	3.466.660,00
12	Meunasah Alue	0,005	3.367.733,46	703.273,23	4.071.007,00
13	Paya Punteuet	0,007	3.367.733,46	1.114.466,15	4.482.200,00
14	Blang Poroh	0,001	3.367.733,46	228.640,10	3.596.374,00
15	Meunasah Manyang	0,003	3.367.733,46	454.573,83	3.822.307,00
16	Meunasah Blang	0,004	3.367.733,46	540.555,66	3.908.289,00
17	Paloh Batee	0,001	3.367.733,46	147.144,98	3.514.878,00
	SUBTOTAL	0,1848	57.251.468,85	28.216.772,06	85.468.241,00

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPOSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	II. BANDA SAKTI				
1	Kuta Blang	0,075	3.367.733,46	11.456.160,61	14.823.894,10
2	Tumpok Teungoh	0,029	3.367.733,46	4.496.434,00	7.864.167,50
3	Simpang Empat	0,063	3.367.733,46	9.589.001,59	12.956.735,10
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,047	3.367.733,46	7.132.260,60	10.499.994,10
5	Kota Lhokseumawe	0,063	3.367.733,46	9.565.924,06	12.933.657,50
6	Mon Geudong	0,028	3.367.733,46	4.309.202,06	7.676.935,50
7	Keude Aceh	0,015	3.367.733,46	2.290.569,06	5.658.302,50
8	Pusong Lama	0,004	3.367.733,46	571.148,50	3.938.882,00
9	Hagu Teungoh	0,041	3.367.733,46	6.258.455,80	9.626.189,30
10	Uteun Bayi	0,017	3.367.733,46	2.562.448,32	5.930.181,80
11	Ujong Blang	0,008	3.367.733,46	1.279.196,34	4.646.929,80
12	Hagu Selatan	0,017	3.367.733,46	2.649.528,17	6.017.261,60
13	Pusong Baru	0,007	3.367.733,46	1.134.861,34	4.502.594,80
14	Ulee Jalan	0,003	3.367.733,46	491.740,10	3.859.473,60
15	Banda Masen	0,009	3.367.733,46	1.318.341,53	4.686.075,00
16	Lancang Garam	0,027	3.367.733,46	4.159.119,06	7.526.852,50
17	Kampung Jawa Baru	0,022	3.367.733,46	3.330.399,29	6.698.132,80
18	Hagu Barat Laut	0,009	3.367.733,46	1.384.986,07	4.752.719,50
	SUBTOTAL	0,4846	60.619.202,31	73.979.776,48	134.598.979,00

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	III. BLANG MANGAT				
1	Kuala	0,002	3.367.733,46	329.072,06	3.696.805,50
2	Blang Cut	0,003	3.367.733,46	390.250,39	3.757.983,90
3	Jambo Mesjid	0,002	3.367.733,46	257.689,64	3.625.423,10
4	Jambo Timu	0,002	3.367.733,46	310.033,74	3.677.767,20
5	Tunong	0,002	3.367.733,46	326.483,93	3.694.217,00
6	Blang Teue	0,001	3.367.733,46	127.455,32	3.495.188,80
7	Teungoh	0,001	3.367.733,46	226.185,44	3.593.918,90
8	Baloy	0,002	3.367.733,46	352.198,54	3.719.932,00
9	Mane Kareung	0,003	3.367.733,46	434.939,66	3.802.673,10
10	Asan Kareung	0,002	3.367.733,46	267.785,55	3.635.519,00
11	Rayeuk Kareung	0,002	3.367.733,46	363.871,31	3.731.604,80
12	Blang Punteuet	0,003	3.367.733,46	494.477,84	3.862.211,30
13	Kumbang Punteuet	0,002	3.367.733,46	288.105,10	3.655.838,60
14	Mesjid Punteuet	0,011	3.367.733,46	1.738.310,12	5.106.043,60
15	Ulee Blang Mane	0,009	3.367.733,46	1.351.465,00	4.719.198,50
16	Keude Punteuet	0,002	3.367.733,46	232.821,78	3.600.555,20
17	Alue Lim	0,008	3.367.733,46	1.247.423,71	4.615.157,20
18	Blang Buloh	0,002	3.367.733,46	381.364,30	3.749.097,80
19	Blang Weu Panjoe	0,004	3.367.733,46	584.864,72	3.952.598,20
20	Jeulikat	0,006	3.367.733,46	887.149,53	4.254.883,00
21	Blang Weu Baroh	0,002	3.367.733,46	299.152,86	3.666.886,30
22	Seuneubok	0,000	3.367.733,46	71.474,58	3.439.208,00
	SUBTOTAL	0,0718	74.090.136,16	10.962.575,13	85.052.711,00

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	IV. MUARA SATU				
1	Batuphat Barat	0,005	3.367.733,46	700.890,42	4.068.623,90
2	Blang Panyang	0,009	3.367.733,46	1.345.597,22	4.713.330,70
3	Meunasah Dayah	0,001	3.367.733,46	129.589,85	3.497.323,30
4	Paloh Punti	0,001	3.367.733,46	192.604,13	3.560.337,60
5	Blang Pulo	0,009	3.367.733,46	1.406.358,53	4.774.092,00
6	Batuphat Timur	0,012	3.367.733,46	1.857.191,97	5.224.925,40
7	Blang Naleung Mameh	0,202	3.367.733,46	30.905.533,24	34.273.266,70
8	Cot Trieng	0,001	3.367.733,46	166.174,26	3.533.907,70
9	Padang Sakti	0,007	3.367.733,46	1.107.966,69	4.475.700,20
10	Meuria Paloh	0,006	3.367.733,46	912.200,84	4.279.934,30
11	Ujong Pacu	0,005	3.367.733,46	787.352,77	4.155.086,20
	SUBTOTAL	0,2536	33.677.334,62	38.724.107,15	76.556.528,00
	TOTAL BHRD	1,0	225.638.141,94	151.883.230,83	381.676.459,00

E. RINCIAN BESARAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	I. MUARA DUA				
1	Alue Awe	0,011	21.634.806,77	10.623.812,10	32.258.618,87
2	Blang Crum	0,006	21.634.806,77	5.751.287,57	27.386.094,33
3	Cut Mamplam	0,006	21.634.806,77	5.434.198,77	27.069.005,53
4	Meunasah Mee	0,009	21.634.806,77	8.485.302,83	30.120.109,60
5	Cot Girek Kandang	0,009	21.634.806,77	8.897.177,71	30.531.984,48
6	Keude Cunda	0,015	21.634.806,77	14.946.693,69	36.581.500,46
7	Uteunkot	0,049	21.634.806,77	48.543.030,94	70.177.837,70
8	Lhok Mon Puteh	0,001	21.634.806,77	1.453.442,01	23.088.248,77
9	Meunasah Mesjid	0,026	21.634.806,77	25.654.679,30	47.289.486,07
10	Meunasah Panggoi	0,031	21.634.806,77	30.359.106,83	51.993.913,60
11	Paya Bili	0,001	21.634.806,77	635.518,28	22.270.325,04
12	Meunasah Alue	0,005	21.634.806,77	4.517.928,94	26.152.735,71
13	Paya Punteuet	0,007	21.634.806,77	7.159.491,74	28.794.298,51
14	Blang Poroh	0,001	21.634.806,77	1.468.817,08	23.103.623,85
15	Meunasah Manyang	0,003	21.634.806,77	2.920.248,01	24.555.054,77
16	Meunasah Blang	0,004	21.634.806,77	3.472.607,74	25.107.414,51
17	Paloh Batee	0,001	21.634.806,77	945.280,60	22.580.087,37
	SUBTOTAL	0,185	367.791.715,05	181.268.624,14	549.060.339,17

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	II. BANDA SAKTI				
1	Kuta Blang	0,075	21.634.806,77	73.596.032,46	95.230.839,23
2	Tumpok Teungoh	0,029	21.634.806,77	28.885.742,22	50.520.548,99
3	Simpang Empat	0,063	21.634.806,77	61.601.132,88	83.235.939,65
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,047	21.634.806,77	45.818.673,48	67.453.480,25
5	Kota Lhokseumawe	0,063	21.634.806,77	61.452.879,52	83.087.686,28
6	Mon Geudong	0,028	21.634.806,77	27.682.937,18	49.317.743,95
7	Keude Aceh	0,015	21.634.806,77	14.714.946,87	36.349.753,64
8	Pusong Lama	0,004	21.634.806,77	3.669.140,55	25.303.947,32
9	Hagu Teungoh	0,041	21.634.806,77	40.205.225,08	61.840.031,84
10	Uteun Bayi	0,017	21.634.806,77	16.461.538,55	38.096.345,31
11	Ujong Blang	0,008	21.634.806,77	8.217.742,28	29.852.549,04
12	Hagu Selatan	0,017	21.634.806,77	17.020.952,11	38.655.758,88
13	Pusong Baru	0,007	21.634.806,77	7.290.513,36	28.925.320,13
14	Ulee Jalan	0,003	21.634.806,77	3.159.009,49	24.793.816,26
15	Banda Masen	0,009	21.634.806,77	8.469.216,65	30.104.023,42
16	Lancang Garam	0,027	21.634.806,77	26.718.782,28	48.353.589,04
17	Kampung Jawa Baru	0,022	21.634.806,77	21.394.966,65	43.029.773,41
18	Hagu Barat Laut	0,009	21.634.806,77	8.897.350,80	30.532.157,57
	SUBTOTAL	0,485	389.426.521,82	475.256.782,38	864.683.304,21

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	III. BLANG MANGAT				
1	Kuala	0,002	21.634.806,77	2.114.006,49	23.748.813,26
2	Blang Cut	0,003	21.634.806,77	2.507.024,94	24.141.831,71
3	Jambo Mesjid	0,002	21.634.806,77	1.655.435,52	23.290.242,28
4	Jambo Timu	0,002	21.634.806,77	1.991.701,59	23.626.508,36
5	Tunong	0,002	21.634.806,77	2.097.379,97	23.732.186,74
6	Blang Teue	0,001	21.634.806,77	818.791,38	22.453.598,14
7	Teungoh	0,001	21.634.806,77	1.453.047,95	23.087.854,72
8	Baloy	0,002	21.634.806,77	2.262.574,36	23.897.381,13
9	Mane Kareung	0,003	21.634.806,77	2.794.115,30	24.428.922,07
10	Asan Kareung	0,002	21.634.806,77	1.720.293,12	23.355.099,88
11	Rayeuk Kareung	0,002	21.634.806,77	2.337.561,91	23.972.368,68
12	Blang Punteuet	0,003	21.634.806,77	3.176.597,16	24.811.403,93
13	Kumbang Punteuet	0,002	21.634.806,77	1.850.828,85	23.485.635,61
14	Mesjid Punteuet	0,011	21.634.806,77	11.167.155,61	32.801.962,38
15	Ulee Blang Mane	0,009	21.634.806,77	8.682.006,62	30.316.813,39
16	Keude Punteuet	0,002	21.634.806,77	1.495.680,76	23.130.487,53
17	Alue Lim	0,008	21.634.806,77	8.013.630,28	29.648.437,05
18	Blang Buloh	0,002	21.634.806,77	2.449.939,42	24.084.746,19
19	Blang Weu Panjoe	0,004	21.634.806,77	3.757.255,54	25.392.062,31
20	Jeulikat	0,006	21.634.806,77	5.699.176,90	27.333.983,66
21	Blang Weu Baroh	0,002	21.634.806,77	1.921.801,23	23.556.607,99
22	Seuneubok	0,000	21.634.806,77	459.163,03	22.093.969,80
	SUBTOTAL	0,072	475.965.748,89	70.425.167,92	546.390.916,81

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	IV. MUARA SATU				
1	Batuphat Barat	0,005	21.634.806,77	4.502.621,39	26.137.428,16
2	Blang Panyang	0,009	21.634.806,77	8.644.311,13	30.279.117,90
3	Meunasah Dayah	0,001	21.634.806,77	832.503,93	22.467.310,70
4	Paloh Punti	0,001	21.634.806,77	1.237.316,81	22.872.123,58
5	Blang Pulo	0,009	21.634.806,77	9.034.650,59	30.669.457,35
6	Batuphat Timur	0,012	21.634.806,77	11.930.869,77	33.565.676,54
7	Blang Naleung Mameh	0,202	21.634.806,77	198.541.614,79	220.176.421,56
8	Cot Trieng	0,001	21.634.806,77	1.067.527,47	22.702.334,24
9	Padang Sakti	0,007	21.634.806,77	7.117.738,26	28.752.545,03
10	Meuria Paloh	0,006	21.634.806,77	5.860.110,14	27.494.916,90
11	Ujong Pacu	0,005	21.634.806,77	5.058.068,08	26.692.874,85
	SUBTOTAL	0,254	237.982.874,44	253.827.332,36	491.810.206,81
	TOTAL BHPD	1,0	1.471.166.860,20	980.777.906,80	2.451.944.767,00

F. RINCIAN BESARAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN / GAMPONG	JUMLAH ALOKASI BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BHPD (Rp)	BHRD (Rp)	TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
	I. MUARA DUA			
1	Alue Awe	32.258.618,87	5.021.465,00	37.280.083,87
2	Blang Crum	27.386.094,33	4.262.995,00	31.649.089,33
3	Cut Mamplam	27.069.005,53	4.213.636,00	31.282.641,53
4	Meunasah Mee	30.120.109,60	4.688.579,00	34.808.688,60
5	Cot Girek Kandang	30.531.984,48	4.752.693,00	35.284.677,48
6	Keude Cunda	36.581.500,46	5.694.377,00	42.275.877,46
7	Uteunkot	70.177.837,70	10.924.075,00	81.101.912,70
8	Lhok Mon Puteh	23.088.248,77	3.593.980,00	26.682.228,77
9	Meunasah Mesjid	47.289.486,07	7.361.211,00	54.650.697,07
10	Meunasah Panggoi	51.993.913,60	8.093.515,00	60.087.428,60
11	Paya Bili	22.270.325,04	3.466.660,00	25.736.985,04
12	Meunasah Alue	26.152.735,71	4.071.007,00	30.223.742,71
13	Paya Punteuet	28.794.298,51	4.482.200,00	33.276.498,51
14	Blang Poroh	23.103.623,85	3.596.374,00	26.699.997,85
15	Meunasah Manyang	24.555.054,77	3.822.307,00	28.377.361,77
16	Meunasah Blang	25.107.414,51	3.908.289,00	29.015.703,51
17	Paloh Batee	22.580.087,37	3.514.878,00	26.094.965,37
	SUBTOTAL	549.060.339,17	85.468.241,00	634.528.580,17

NO	KECAMATAN / GAMPONG	JUMLAH ALOKASI BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BHPD (Rp)	BHRD (Rp)	TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
	II. BANDA SAKTI			
1	Kuta Blang	95.230.839,23	14.823.894,10	110.054.733,33
2	Tumpok Teungoh	50.520.548,99	7.864.167,50	58.384.716,49
3	Simpang Empat	83.235.939,65	12.956.735,10	96.192.674,75
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	67.453.480,25	10.499.994,10	77.953.474,35
5	Kota Lhokseumawe	83.087.686,28	12.933.657,50	96.021.343,78
6	Mon Geudong	49.317.743,95	7.676.935,50	56.994.679,45
7	Keude Aceh	36.349.753,64	5.658.302,50	42.008.056,14
8	Pusong Lama	25.303.947,32	3.938.882,00	29.242.829,32
9	Hagu Teungoh	61.840.031,84	9.626.189,30	71.466.221,14
10	Uteun Bayi	38.096.345,31	5.930.181,80	44.026.527,11
11	Ujong Blang	29.852.549,04	4.646.929,80	34.499.478,84
12	Hagu Selatan	38.655.758,88	6.017.261,60	44.673.020,48
13	Pusong Baru	28.925.320,13	4.502.594,80	33.427.914,93
14	Ulee Jalan	24.793.816,26	3.859.473,60	28.653.289,86
15	Banda Masen	30.104.023,42	4.686.075,00	34.790.098,42
16	Lancang Garam	48.353.589,04	7.526.852,50	55.880.441,54
17	Kampung Jawa Baru	43.029.773,41	6.698.132,80	49.727.906,21
18	Hagu Barat Laut	30.532.157,57	4.752.719,50	35.284.877,07
	SUBTOTAL	864.683.304,21	134.598.979,00	999.282.283,21

NO	KECAMATAN / GAMPONG	JUMLAH ALOKASI BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BHPD (Rp)	BHRD (Rp)	TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
	III. BLANG MANGAT			
1	Kuala	23.748.813,26	3.696.805,50	27.445.618,76
2	Blang Cut	24.141.831,71	3.757.983,90	27.899.815,61
3	Jambo Mesjid	23.290.242,28	3.625.423,10	26.915.665,38
4	Jambo Timu	23.626.508,36	3.677.767,20	27.304.275,56
5	Tunong	23.732.186,74	3.694.217,00	27.426.403,74
6	Blang Teue	22.453.598,14	3.495.188,80	25.948.786,94
7	Teungoh	23.087.854,72	3.593.918,90	26.681.773,62
8	Baloy	23.897.381,13	3.719.932,00	27.617.313,13
9	Mane Kareung	24.428.922,07	3.802.673,10	28.231.595,17
10	Asan Kareung	23.355.099,88	3.635.519,00	26.990.618,88
11	Rayeuk Kareung	23.972.368,68	3.731.604,80	27.703.973,48
12	Blang Punteuet	24.811.403,93	3.862.211,30	28.673.615,23
13	Kumbang Punteuet	23.485.635,61	3.655.838,60	27.141.474,21
14	Mesjid Punteuet	32.801.962,38	5.106.043,60	37.908.005,98
15	Ulee Blang Mane	30.316.813,39	4.719.198,50	35.036.011,89
16	Keude Punteuet	23.130.487,53	3.600.555,20	26.731.042,73
17	Alue Lim	29.648.437,05	4.615.157,20	34.263.594,25
18	Blang Buloh	24.084.746,19	3.749.097,80	27.833.843,99
19	Blang Weu Panjoe	25.392.062,31	3.952.598,20	29.344.660,51
20	Jeulikat	27.333.983,66	4.254.883,00	31.588.866,66
21	Blang Weu Baroh	23.556.607,99	3.666.886,30	27.223.494,29
22	Seuneubok	22.093.969,80	3.439.208,00	25.533.177,80
	SUBTOTAL	546.390.916,81	85.052.711,00	631.443.627,81

NO	KECAMATAN / GAMPONG	JUMLAH ALOKASI BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BHPD (Rp)	BHRD (Rp)	TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
	IV. MUARA SATU			
1	Batuphat Barat	26.137.428,16	4.068.623,90	30.206.052,06
2	Blang Panyang	30.279.117,90	4.713.330,70	34.992.448,60
3	Meunasah Dayah	22.467.310,70	3.497.323,30	25.964.634,00
4	Paloh Punti	22.872.123,58	3.560.337,60	26.432.461,18
5	Blang Pulo	30.669.457,35	4.774.092,00	35.443.549,35
6	Batuphat Timur	33.565.676,54	5.224.925,40	38.790.601,94
7	Blang Naleung Mameh	220.176.421,56	34.273.266,70	254.449.688,26
8	Cot Trieng	22.702.334,24	3.533.907,70	26.236.241,94
9	Padang Sakti	28.752.545,03	4.475.700,20	33.228.245,23
10	Meuria Paloh	27.494.916,90	4.279.934,30	31.774.851,20
11	Ujong Pacu	26.692.874,85	4.155.086,20	30.847.961,05
	SUBTOTAL	491.810.206,81	76.556.528,00	568.366.734,81
	TOTAL	2.451.944.767,00	381.676.459,00	2.833.621.226,00

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

A. FORMAT KELENGKAPAN PENYALURAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2018

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. BHPD dan BHRD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan BHPD dan BHRD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. ..... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2018
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD dan BHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD dan BHRD
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan BHPD dan BHRD Tahun Anggaran sebelumnya

Penerimaan dari Kas Umum Kota Lhokseumawe:
Tahap I : Rp
Tahap II : Rp

Rp

Realisasi Pembayaran melalui SPM Gampong
Tahap ini : Rp
Kumulatif s.d Tahap ini : Rp

Sisa BHPD dan BHRD di Rekening Kas Umum Gampong : Rp
Persentase Sisa Dana BHPD dan BHRD : %

NO	GAMPONG	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Gampong			Sisa Pagu (Rp)
			Tahap Sebelumnya (Rp)	Tahap Ini (Rp)	Kumulatif s.d Tahap Ini (Rp)	
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong.....

Materai 6000

ttd

( )

3. LAPORAN PENGGUNAAN BHPD dan BHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN PENGGUNAAN BHPD dan BHRD
TAHAP ..... (.....) .....% (.....) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor : 412.25/..... /.....

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KEUCHIK	ALAMAT	JUMLAH PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	PENGGUNAAN DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
JUMLAH							

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

4. BUKTI TRANSFER

KOP GAMPONG

BUKTI TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima :
Untuk keperluan : BHPD dan BHRD Tahap.....(...) .... (.....Persen)
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II : Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :			

Lhokseumawe, ...2018
Keuchik Gampong .....

ttd

Materai 6000

(.....)

5. FORMAT KWITANSI

No.	: _____	Asli _____
Kode Rekening	: _____	Kedua _____
Tahun	: 2018 _____	Ketiga _____
		Keempat _____

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran BHPD dan BHRD Tahap ..... (.....)
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah diterima/Diselenggarakan dengan sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

.....

B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN BHPD dan BHRD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : ...../SPP/...../2018

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2018 Tanggal ..... Januari 2018 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : .....
b. Kegiatan : .....
c. Tahun Anggaran : 2018
d. Keperluan : .....
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(.....Rupiah)

....., ...2018
Pelaksana Kegiatan,
Kasi .....
Gampong .....

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/2016

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong.....,..... 2018

Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong	Telah Dibayar Lunas Bendahara Gampong.....	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....	Pelaksana Kegiatan, Kasi..... Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode .../.../2018 s.d .../.../2018

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...2018

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Bendahara Gampong

ttd

(.....)

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2018

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Keperluan : .....
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...2018

Disetujui,	Telah Diverifikasi	
Keuchik	Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi ..... Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : .....

2. Kegiatan : .....

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2018

Pelaksana Kegiatan,
Kasi .....
Gampong .....

ttd

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA